

**THE EFFECT OF ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY AND QUALITY OF HUMAN RESOURCE ON
VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT
(EMPIRICAL STUDY ON VILLAGE GOVERNMENT IN SOLOK REGENCY, WEST SUMATRA)**

Abdul Latif¹, Enni Savitri², Susilatri³

^{1,2&3}Universitas Riau

Email: abdullatif@gmail.com^{1*}

ABSTRACT

This study aims to determine: The effect of accountability on village financial management. The effect of transparency on village financial management. The effect of quality of human resource on village financial management. The population in this study was 74 villages in Solok Regency, West Sumatra. The sample used in this study was 43 villages with a total of 129 respondents. Respondents consist of: Village head, village secretary and head of finance. The sampling method used was proportional stratified random sampling. The analytical method used in this study is multiple linear regression analysis. The analytical method used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that: Accountability influences village financial management. Transparency affects village financial management. Quality of human resource influence the village financial management.

Keywords: Accountability; Transparency; Quality of Human Resource; Village Financial Management.

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN SOLOK, SUMATRA BARAT)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa. Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan desa. Jumlah keseluruhan populasi pada penelitian sebanyak 74 Desa yang terletak di Kabupaten Solok, Sumatra Barat. Dalam penelitian ini, sampel yang dipakai sebanyak 43 desa yakni jumlah keseluruhan responden sebanyak 129. Responden terdiri dari: Kepala desa, Sekretaris desa dan Kaur keuangan. Metode pengambilan sampel menggunakan proportional stratified random sampling. Metode analisis yang digunakan ialah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci: Akuntabilitas; Transparansi; Kualitas Sumber Daya Manusia; Pengelolaan Keuangan Desa.

PENDAHULUAN

Desa merupakan salah satu elemen yang sangat penting didalam suatu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berperan dalam proses pelaksanaan pembangunan sebagai program pemerintah daerah terutama pada Kabupaten ataupun Kota. Desa adalah struktur pemerintah paling bawah yang tentunya perlu adanya pembaharuan melalui pembangunan demi kesetaraan penduduk atau masyarakat. Oleh karena itu, desa memiliki peran yang sangat penting dalam proses menunjang keberhasilan otonomi daerah maupun pemerintahan secara luas. Dalam hal ini desa dijadikan garda terdepan didalam mencapai keberhasilan dari semua kebijakan maupun upaya yang diselenggarakan oleh pemerintahan.

Secara umum, fungsi otonomi daerah dalam membangun sebuah daerah lebih difokuskan pada daerah meliputi kota/kabupaten, kecamatan hingga struktural pemerintahan daerah paling bawah yakni desa. Dimana desa merupakan salah satu penentu utama dalam menilai berhasil atau tidaknya program otonomi daerah yang dilaksanakan didalam suatu pemerintahan daerah.

Berdasarkan peranan yang dimiliki oleh desa juga termuat didalam UU No 6 tahun 2014, yakni menjelaskan bahwa desa adalah masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayah serta memiliki wewenang dalam melakukan pengaturan maupun mengelola pemerintahan, mengedepankan kesejahteraan masyarakat didasarkan atas prakarsa masyarakat itu sendiri, mempunyai atas hak asal-usul maupun hak tradisional yang telah terakui maupun dianggap didalam sistem pemerintahan NKRI. Berdasarkan hak dan kewenangan tersebut kepada pemerintah desa, dilakukan agar bisa mengembangkan desa menjadi lebih mandiri, maju serta demokratis.

Didalam pelaksanaan pembangunan daerah yang dilakukan didalam desa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan bantuan berupa dana desa untuk dapat dipergunakan dalam aktivitas pelaksanaan pembangunan desa. Dimana dana desa yang diberikan sebagai sumber daya dalam melaksanakan program-program pembangunan baik dalam Nasional, Provinsi, maupun Daerah. Pemberian dana desa juga memberikan motivasi kepada masyarakat didesa agar dapat membangun desanya melalui program-program yang diciptakan dalam rangka menciptakan atau menggali potensi-potensi desa serta mengembangkan potensi desa yang sudah ada. Namun, pengelolaan dana desa juga menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya adalah penyelewengan penggunaan dana desa.

Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) provinsi Sumatra Barat (Sumbar), menyebutkan penyelewengan dana desa (DD) oleh perangkat desa di wilayah setempat sudah terjadi sebanyak empat kasus. Ada beberapa kasus penyelewengan dana desa tahun sebelumnya yang sedang ditangani Aparat Penegak Hukum (APH). Dua kasus di Kabupaten Solok dan dua kasus di kepulauan Mentawai. Semua sedang proses di Polres dan Kejaksaan (Padang Gatra.com).

Salah satu kasus penyelewengan penggunaan dana desa terjadi di Kabupaten Solok. Dimana kasus tersebut menyebabkan kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan oleh Walnag Talang Babungo pada tahun 2018. Dana yang diambil merupakan dana untuk pembangunan, dimana dari keseluruhan proyek pembangunan hanya beberapa proyek yang terselesaikan, dan pada saat pengerjaannya tidak tuntas dikerjakan. Berdasarkan peristiwa tersebut kerugian yang diakibatkan mencapai Rp 800.000.00,-. Hasil tersebut dilihat dari adanya ketidaksesuaian SPJ yang diberikan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta adanya penarikan dana pribadi yang tidak sesuai dengan anggaran.

Permasalahan diatas menjelaskan adanya indikasi terjadinya masalah dalam hal pengelolaan dana desa, dimana dalam hal pertanggungjawaban ditemukan adanya keterlambatan dan belum disampaikannya laporan keuangan pemerintah desa. Selain itu juga terjadi tindakan merugikan Negara seperti adanya penyelewengan dana desa. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai suatu hal yang dapat menimbulkan beberapa dampak akibat proses pengelolaan keuangan desa. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu sistem akuntabilitas publik, transparansi keuangan dana desa, serta kualitas sumber dana manusia (SDM) yang terdapat dilingkungan pemerintahan didalam desa itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah Akuntabilitas. Jenis akuntabilitas yang berpengaruh pada pengelolaan dana desa sendiri merupakan jenis akuntabilitas publik. Dimana akuntabilitas publik ialah suatu pertanggungjawaban pemerintah selaku pengelola dana desa untuk dikelola secara maksimal dengan cara menyampaikan, dan membuat pelaporan atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk program pelaksanaan tugas dan kewajibannya atas amanah yang diberikan oleh masyarakat (Mardiasmo, 2018). Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa telah diteliti oleh beberapa peneliti diantaranya yang dilakukan oleh (Umami & Nurodin, 2017), dan (Safrizal et al., 2019), dimana dalam kedua penelitian tersebut menerangkan bahwa faktor akuntabilitas memiliki pengaruh pada pengelolaan keuangan dana desa.

Faktor lainnya yang juga dapat mempengaruhi tata kelola keuangan dana desa adalah transparansi. Dimana transparansi merupakan Keterbukaan informasi baik dalam pengambilan keputusan maupun pengungkapan informasi yang material dan yang relevan dengan perusahaan (Purba, 2012). Didalam penelitian (Umami & Nurodin, 2017) dan (Putra & Rasmini, 2019) menerangkan bahwa transparansi adalah faktor yang dapat mempengaruhi keuangan dana desa.

Selain akuntabilitas dan transparansi, kualitas SDM juga merupakan salah satu faktor yang berperan dalam mempengaruhi sistem tata kelola keuangan desa. Kualitas SDM dapat melihat sejauh mana kemampuan SDM

dalam melakukan tugas serta wewenang yang diamanahkan sebagai bentuk tanggung jawabnya berdasarkan pendidikan, pelatihan maupun pengalaman yang telah dilakukan (Arfianti, 2011) Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Situmorang, 2018) yang menyatakan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ramadan, 2019) yang menyatakan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan fenomena dan analisis permasalahan tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui dari beberapa faktor diatas meliputi akuntabilitas, transparansi dan kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja instansi pemerintah desa dalam mengelola keuangan dana desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut sistem kelembagaan, pengaturan desa didasarkan atas wilayah yuridiksinya. Dalam proses tata kelola keuangan desa yang terdapat didalam sistem terdiri atas beberapa bagian, meliputi Penganggaran (Penyediaan), sumber pendapatan desa, dan Belanja (pengeluaran) desa. Dari bagian-bagian tersebut dibentuklah suatu sistem yang dikenal dengan nama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Yuliarta, 2013).

Dalam melakukan tahap awal pengelolaan keuangan secara baik dan benar untuk mencapai tujuan visi-misi desa maka pemerintahan melakukan penganggaran. Penganggaran dilakukan agar dapat mengoptimalkan sumber dana yang ada untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan selama operasi kegiatan dilakukan dan meminimalisir adanya kerugian yang terjadi pada saat proses pemerintahan berlangsung. Penganggaran yang paling utama yang dilakukan oleh pemerintahan desa adalah APBDes atau anggaran pendapatan belanja desa.

APBDes merupakan perencanaan keuangan yang dilakukan selama kurun waktu periode pertahun oleh pemerintah di desa yang kemudian di bahas serta disetujui bersama-sama oleh pemerintahan didesa dan BPD atau badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan sesuai dengan peraturan desa.

Sebagai pihak dalam mengelola keuangan pemerintah desa maka dibuat tugas dan wewenang sesuai dengan haknya dalam hal ini yang lebih berperan dalam mengelola keuangan adalah bendahara desa. Bendahara merupakan seorang yang bertugas sebagai perangkat desa yang diberikan tugas langsung oleh kepala desa dalam membuat rangkaian akuntansi keuangan didalam desa berupa penerimaan, penyimpanan, penyetoran, penatausahaan, pembayaran, serta pertanggung jawaban dalam keuangan didesa dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, menjelaskan bahwa Keuangan Desa (PKS) adalah hak setiap desa dan merupakan kewajiban desa. Dapat dinilai dengan uang dan hal-hal lain yang seperti uang atau hal-hal yang berkaitan dengan hak desa atau kewajiban kepada desa. Sumber pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa, dana dari pemerintah, dan hasil dari badan usaha milik desa. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah maupun pusat didalam desa menggunakan pembiayaan dari APBDes yang telah dianggarkan.

Akuntabilitas

Definisi akuntabilitas menurut Lembaga Administrasi Nasional dan badan Pemeriksa Keuangan (2000:12) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban atas kinerja yang telah dilakukan atas amanah yang telah diberikan. Setiap badan ataupun lembaga tidak lepas dari faktor akuntabilitas, sebab memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan beberapa nilai efisiensi, efektivitas, keandalan, serta prediktabilitas atas kinerja yang telah dilaksanakan dalam mengukur sejauh mana penempatan tujuan yang telah direncanakan sudah terlaksana.

Akuntabilitas ialah bentuk tanggung jawab secara publik mengenai anggaran yang dikeluarkan diawali dengan melakukan perencanaan (planing), penyusunan, dan pelaksanaan yang wajib dilaporkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tugas yang diberikan terhadap masyarakat. akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh orang ataupun lembaga atas seluruh tindakannya yang ditujukan kepada yang pemberi kewenangan. Akuntabilitas terdiri atas 2 jenis berdasarkan sifatnya, yakni akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. Dalam penelitian ini, akuntabilitas yang dibahas adalah akuntabilitas mengenai keuangan yang dalam hal ini berhubungan dengan penganggaran dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa.

Transparansi

Menurut peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia No.13 Pasal 4 Ayat 7, menerangkan bahwa transparansi merupakan suatu bentuk keterbukaan suatu instansi kepada masyarakat agar dapat mengetahui dan mendapatkan akses mengenai informasi yang perlu diketahui baik sistem pemerintahan, dan tata kelola keuangan yang dijalankan. Setiap institusi yang dalam kegiatannya berkaitan dengan masyarakat luas atau publik perlu menunjukkan keterbukaan informasi atau transparansi yang bisa di dapatkan oleh publik sebagai bentuk kontrol atau pengawasan terhadap institusi tersebut. Transparansi adalah keadaan di mana organisasi melakukan keterbukaan informasi pada masyarakat secara jujur dalam menjalankan kegiatannya. Dengan pemberlakuan

sistem transparansi yang baik oleh instansi dapat mempengaruhi publik untuk meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja lembaga ataupun instansi tersebut yang termasuk pula lembaga pemerintahan.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut (Arfianti, 2011) Kualitas sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh manusia yang ada didalam lingkup pekerjaan untuk menjalankan tugas yang telah diberikan berdasarkan ilmu pengetahuan, pendidikan, pelatihan, serta pengalaman yang telah diperoleh.

Kualitas SDM menurut (Ismail & Widodo, 2016) terdiri dari beberapa indikator, yaitu: (1). Pendidikan, (2). Pelatihan, (3). Pengalaman.

Pengaruh Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas publik ialah suatu pertanggung jawaban pemerintah selaku pengelola dana desa untuk dikelola secara maksimal dengan cara menyampaikan, dan membuat pelaporan atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk program pelaksanaan tugas dan kewajibannya atas amanah yang diberikan oleh masyarakat (Mardiasmo, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh (Sukmawati & Nurfitriani, 2019) yang menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

H1 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi merupakan Keterbukaan informasi baik dalam pengambilan keputusan maupun pengungkapan informasi yang material dan yang relevan dengan perusahaan (Purba, 2012). Didalam penelitian (Umami & Nurodin, 2017) dan (Putra & Rasmini, 2019). menerangkan bahwa transparansi adalah faktor yang dapat mempengaruhi keuangan dana desa.

H2 : Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

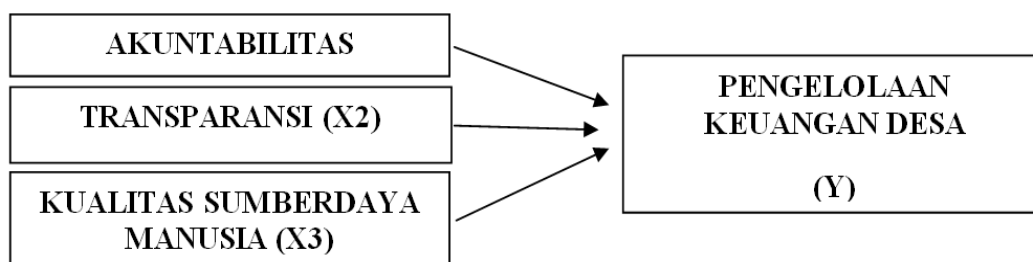
Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut (Arfianti, 2011) Kualitas sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh manusia yang ada didalam lingkup pekerjaan untuk menjalankan tugas yang telah diberikan berdasarkan ilmu pengetahuan, pendidikan, pelatihan, serta pengalaman yang telah diperoleh. Penelitian yang dilakukan oleh (Situmorang, 2018) yang menyatakan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

H3 : Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan deskripsi hubungan antar variable, maka dirumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Didalam melaksanakan suatu penelitian terdapat populasi sebagai penentu objek yang akan dipakai didalam melakukan penelitian. Dimana populasi merupakan tempat yang menjadi wilayah generalisasi dalam penelitian meliputi objek maupun subjek yang memiliki ciri khas ataupun kategori yang telah ditentukan oleh peneliti agar dapat dianalisis dan disimpulkan (Sugiyono, 2014). Populasi yang dipakai dalam penelitian ini terdiri atas pemerintah desa di Kabupaten Solok Sumatra Barat yang berjumlah 74 desa. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik yang digunakan dalam penentuan sampel ini adalah *Proportional Stratified Random Sampling*. (Sugiyono, 2014). Sehingga didapatlah total keseluruhan sampel sebanyak 43 Desa dengan 11 kecamatan berbeda dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Solok. Berdasarkan kriteria yang dipilih terdapat masing-masing desa berjumlah 3 responden. Sehingga jumlah yang digunakan dalam penelitian berjumlah 129 responden.

Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer. Dimana data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung atas wawancara atau pemberian kuisioner kepada responden terpilih. Dalam penelitian ini responden terdiri atas Pemerintah Desa di 14 Kecamatan yang terletak di Kabupaten Solok.

Teknik Pengumpulan Data

Definisi operasional adalah petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur, sehingga peneliti dapat mengetahui baik atau buruk pengukuran tersebut (Sugiyono, 2014). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan koesioner dengan cara memberikan surat yang berisikan pertanyaan kepada instansi terkait melalui peninjauan secara langsung.

Analisis Statistik Deskriptif

Pada penelitian memakai analisis statistik deskriptif, yang diawali dengan mengumpulkan data, menyusun, menginterpretasikan, serta menganalisis data-data tersebut agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada didalam penelitian.

Teknik Analisis Data

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda (*Multiple Regression Analysis*). Jadi persamaan analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= Pengelolaan Keuangan Desa
α	= Konstanta
X1	= Akuntabilitas
X2	= Transparansi
X3	= Kualitas Sumber Daya Manusia
b (1,2,3)	= Koefisien Regresi.
e	= Faktor Pengganggu (Error)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bisa diketahui atau diukur dengan nilai rata-rata (*mean*). Nilai maksimum dan nilai minimum, serta standar deviasi (*standard deviation*) yang terdapat didalam peneliti (Ghozali, 2018). Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan maka diperoleh hasil sebagai berikut ini:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	129	26	45	35.15	4.393
Transparansi	129	26	45	39.55	3.861
Kualitas SDM	129	21	35	28.04	4.080
PKD	129	87	135	111.85	9.768
Valid N (listwise)	129				

Sumber: Data Olahan, 2020

Variabel Akuntabilitas dari tabel tersebut memiliki nilai minimum sebanyak 26.00, dan nilai maksimum sebanyak 45.00. Mean yang diperoleh pada variabel akuntabilitas sebanyak 35.15. Dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata responden mengisi pilihan setuju dan sangat setuju pada kuesioner mengenai Akuntabilitas. Sedangkan standar deviasi sebanyak 4.393. Berdasarkan angka tersebut dapat disimpulkan bahwa sebaran data yang diperoleh tidak terlalu besar, sebab memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan mean (Nilai rata-rata).

Pada variabel Transparansi memiliki nilai minimum 26.00, dan nilai maksimum 45.00, serta mean 39.55. Berdasarkan nilai tersebut menunjukkan bahwa rata-rata responden memilih mengisi pilihan setuju dan sangat setuju pada pernyataan di kuesioner mengenai Transparansi. Standar deviasi sebanyak 3.861, berdasarkan angka tersebut dapat disimpulkan bahwa sebaran data yang diperoleh tidak terlalu besar, sebab memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan mean (Nilai rata-rata).

Untuk variabel Kulitas SDM miliki nilai minimum 21.00, nilai maksimum 35.00, dan mean 28.04. Dari nilai tersebut menunjukkan bahwa rata-rata responden mengisi pilihan tidak setuju dan sangat setuju pada pernyataan di kuesioner mengenai Kulitas SDM. Standar deviasi sebanyak 4.080 berdasarkan angka tersebut dapat

disimpulkan bahwa sebaran data yang diperoleh tidak terlalu besar, sebab memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan mean (Nilai rata-rata).

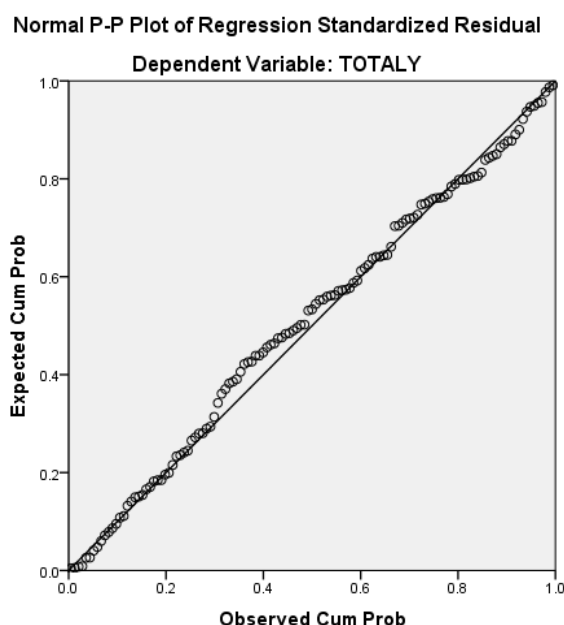
Variabel Pengelolaan keuangan desa sebagai variabel memiliki nilai minimum 87.00, nilai maksimum 135.00, dan mean sebanyak 111.85 hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengisi pilihan setuju pada pernyataan di kuesioner mengenai Pengelolaan keuangan desa. Standar deviasi pada variabel ini yaitu sebanyak 9.768 berdasarkan angka tersebut dapat disimpulkan bahwa sebaran data yang diperoleh tidak terlalu besar, sebab memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan mean (Nilai rata-rata).

Hasil Uji Kualitas Data

Hasil Uji Normalitas

Penelitian ini melakukan pengujian normalitas dengan melihat dari *normal probability plot*. Metode ini dilakukan dengan cara melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal

Berdasarkan gambar di bawah ini peneliti melihat bahwa data residual yang digunakan menyebar di sekitar dan mengikuti garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual tersebut berada pada keadaan normal.



Sumber: Pengolahan data dengan SPSS, 2020

Gambar 2. Normal Probability Plot

Hasil Uji Multikolinearitas

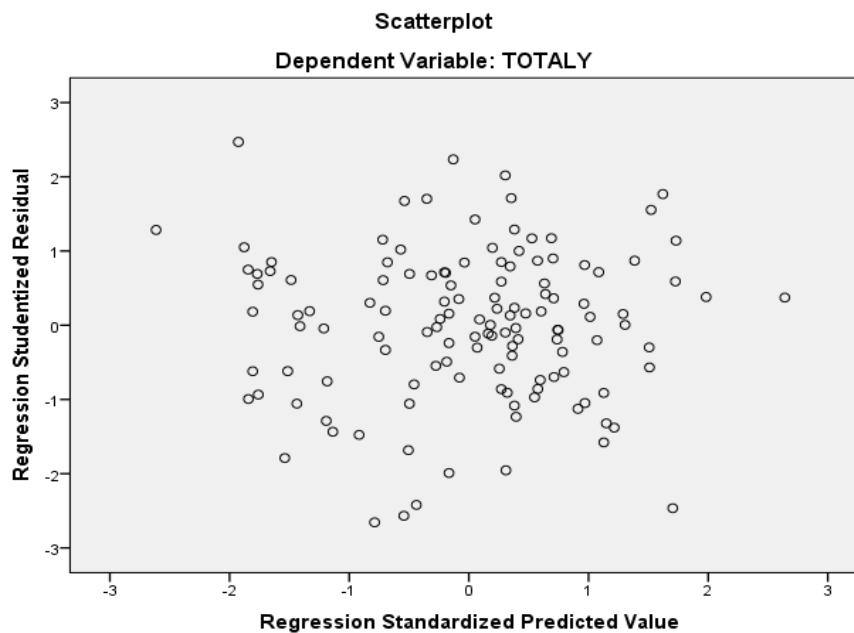
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Constant			
Akuntabilitas	.876	1.142	Bebas Multikolinearitas
Transparansi	.832	1.201	Bebas Multikolinearitas
Kualitas SDM	.820	1.220	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS, 2020

Pada tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa hasil analisis data atas model regresi, diperoleh nilai VIF untuk variabel Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas SDM lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 atau nilai $VIF < 10$ dan nilai $tolerance > 0,10$. Dari nilai tersebut dapat diartikan bahwa model regresi pada penelitian terbebas dari multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Pengolahan data dengan SPSS, 2020

Gambar 3. Scatterplot

Berdasarkan gambar 3 diatas dapat dilihat bahwa penyebaran titik tidak beraturan atau acak dengan tersebar diatas dan dibawah angka (0). Sehingga kesimpulan atas gambar tersebut yakni model regresi pada penelitian terbebas dari heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.636 ^a	.404	.390	7.629	2.093

a. Predictors: (Constant), TOTALX2, TOTALX1, TOTALX3
b. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS, 2020

Pada table 3 diatas dapat dilihat bahwa nilai hitung *Durbin-Watson* adalah sebesar 2.093. Nilai tabel *Durbin-Watson* dengan $\alpha = 5\%$; $n = 129$; (K-4) didapat nilai dU adalah sebesar 1,7745 dan nilai 4-dU = 4-1,7745 = 2,225. Selanjutnya dapat dilihat bahwa nilai hitung *Durbin-Watson* sebesar 2,093 lebih besar dari 1,7745 dan lebih kecil dari 2,254 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi pada model yang dibangun serta dalam modal regresi linier tidak ada korelasi atau hubungan antara setiap variabel.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4. Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	29.415	10.180		2.890	.005
AKUNTANBILITAS	.855	.164	.384	5.211	.000
TRANSPARANSI	.683	.191	.270	3.566	.001
KUALITAS SDM	.906	.183	.378	4.960	.000

a. Dependent Variable: PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS, 2020

Berdasarkan hasil analisis regresi diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah:

$$Y = 29.415 + 0,855X_1 + 0,683X_2 + 0,906X_3 + e$$

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan keuangan desa

Berdasarkan table 4 diatas memperlihatkan nilai t-hitung 5,211 dan nilai signifikansi 0.000 dengan perolehan nilai t tabel pada taraf signifikansi 5% (2-tailed) dengan persamaan n-k-1: $\alpha/2 = 129-3-1: 0,05/2 = 125: 0,025$ sehingga diperoleh nilai t tabel sebesar 1,97912 dimana n merupakan total sampel pada penelitian, k merupakan total variabel bebas dan 1 adalah nilai konstan. Berdasarkan penjelasan diatas nilai t hitung 5,211 > 1,990 (t tabel) dan nilai Sig 0,00 < 0,05. Artinya H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima, ini menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Trasnparansi Terhadap Pengelolaan keuangan desa

Berdasarkan table 4 diatas memperlihatkan nilai t hitung 3,566 dan nilai signifikansi 0.001 dengan perolehan nilai t tabel pada taraf signifikansi 5% (2-tailed) dengan persamaan n-k-1: $\alpha/2 = 129-3-1: 0,05/2 = 125: 0,025$ sehingga diperoleh nilai t tabel sebesar 1,97912 dimana n merupakan total sampel penelitian, k merupakan total variabel bebas dan 1 ialah nilai konstan. Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa nilai t hitung 3,566 > 1,990 (t tabel) dan nilai Sig 0,001 < 0,05. Artinya H_{02} diterima dan H_{a2} diterima, ini menunjukkan bahwa variabel transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Kualitas SDM Terhadap Pengelolaan keuangan desa

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 4.960 dan nilai signifikansi 0.000 dengan perolehan nilai t tabel pada taraf signifikansi 5% (2-tailed) dengan persamaan n-k-1: $\alpha/2 = 129-3-1: 0,05/2 = 125: 0,025$ sehingga diperoleh nilai t tabel sebesar 1,97912 dimana n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel bebas dan 1 adalah nilai konstan. Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa nilai t hitung 4.960 > 1,990 (t tabel) dan nilai Sig 0,000 < 0,05. Artinya H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima, ini menunjukkan bahwa variabel Kualitas SDM berpengaruh terhadap Pengelolaan keuangan desa.

Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan keuangan desa

Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat atas berbagai pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah desa. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Menurut kepala desa di kabupaten solok bahwa dalam membuat suatu program menghasilkan output yang maksimal kepada masyarakat.

Menurut sekretaris desa, akuntabilitas berperan dalam penyusunan program-program yang dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dengan tujuan kepentingan publik sehingga pelaksanaan program tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Sedangkan menurut kaur keuangan, dengan adanya akuntabilitas dalam tahapan pengelolaan dana desa agar proses dan pertanggungjawaban anggaran diawasi secara terus menerus.

Menurut hasil yang ditunjukkan dalam penelitian sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan (Umami & Nurodin, 2017) dan (Sukmawati & Nurfitriani, 2019) yakni menghasilkan variabel akuntabilitas memiliki pengaruh pada pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi pada penelitian yang dilakukan (Triyono et al., 2018). menghasilkan ketidaksamaan hasil penelitian yakni akuntabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Trasnparansi Terhadap Pengelolaan keuangan desa

Setiap institusi yang dalam kegiatannya berkaitan dengan masyarakat luas atau publik perlu menunjukkan keterbukaan informasi atau transparansi yang bisa di dapatkan oleh publik sebagai bentuk kontrol atau pengawasan terhadap institusi tersebut. Transparansi adalah keadaan di mana organisasi melakukan keterbukaan informasi pada masyarakat secara jujur dalam menjalankan kegiatannya. Dengan pemberlakuan sistem transparansi yang baik oleh instansi dapat mempengaruhi publik untuk meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja lembaga ataupun instansi tersebut yang termasuk pula lembaga pemerintahan. Oleh karena itu pemerintahan desa harus melakukan keterbukaan baik yang bersifat material ataupun non material agar masyarakat bisa memperoleh akses informasi yang lebih luas. Dengan adanya transparansi, semua keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Menurut kepala desa di kabupaten solok, pengumuman keuangan desa baik perencanaan,

pelaksanaan, pertanggungjawaban maupun pengawasan telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Menurut pemaparan beberapa kepala desa yang ada di Kabupaten Solok, menjelaskan bahwa sistem pemerintahan telah dilakukan secara transparan dalam lingkup sistem keuangan desa yang diawali dari perencanaan pelaksanaan pertanggung jawaban serta pengawasan dalam pemerintahan yang telah dijalankan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Umami & Nurodin, 2017) dan (Putra & Rasmini, 2019), yakni transparansi memiliki pengaruh pada pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan hasil penelitian (Safrizal et al., 2019) yang mana dalam penelitiannya transparansi tidak memiliki pengaruh pada pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Kualitas SDM Terhadap Pengelolaan keuangan desa

Berdasarkan analisis hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik dipengaruhi oleh ketersediaan kualitas SDM yang baik baik dalam segi pendidikannya, pelatihan yang diikuti serta pengalaman dalam pengelolaan keuangan desa. Peningkatan SDM yang ada didalam pemerintahan desa didorong oleh adanya tingkat pendidikan oleh setiap perangkat desa serta pengadaan berbagai pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik dalam lingkup daerah ataupun pusat. Tidak hanya itu saja, pengalaman seorang tenaga kerja dalam mengelola keuangan dana desa juga sangat berpengaruh pada kualitas SDM yang ada dalam pemerintahan desa itu sendiri. Menurut kepala desa di kabupaten solok, dalam pengelolaan keuangan desa uraian tugas bagian keuangan telah sesuai dengan fungsi akuntansi. Menurut pemaparan sekretaris desa, pemerintah desa telah mengadakan berbagai pelatihan guna meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan tugasnya baik dalam mengelola keuangan atau keakuntansian amupun dalam bidang lainnya. Sedangkan menurut kaur keuangan, bagian keuangan telah mendapatkan pelatihan dalam melaksanakan tugas sehingga kinerja dan keahlian meningkat dalam pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Situmorang, 2018) dan (Ramadan, 2019) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan (Triyono et al., 2018) menyimpulkan bahwa kapasitas aparat desa tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk dapat menilai dan mengukur keseluruhan variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen maka perlu melakukan pengukuran uji koefisien determinasi. Apabila hasil uji koefisien determinasi semakin tinggi maka akan semakin baik pula variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Berikut merupakan tabel uji koefisien determinasi pada penelitian :

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.636 ^a	.404	.390	7.629	2.093

a. Predictors: (Constant), TOTALX3, TOTALX1, TOTALX2

b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS, 2020

Berdasarkan hasil tabel di atas, menunjukkan nilai *R Square* 0,390. Angka tersebut dapat diartikan bahwa spengaruh variabel X1, X2, X3, terhadap Y yakni sebanyak 39,00% . sementara 61,00% lainnya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak terdapat pada penelitian ini seperti faktor eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, dan lainnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa karena pelaksanaan program-program yang dirancang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tahapan pengelolaan anggaran melibatkan unsur-unsur masyarakat. Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa karena informasi tentang keuangan desa dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat maupun pihak pengguna informasi lainnya. Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa karena uraian tugas bagian keuangan telah sesuai dengan fungsi akuntansi dan telah memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: Penelitian selanjutnya perlu memperluas ruang lingkup penelitian sehingga hasil penelitian selanjutnya diharapkan dapat diterapkan dan berlaku secara umum. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperpanjang periode pengamatan dan memperluas kabupaten dan kota yang akan diteliti sehingga hasil penelitian yang diperoleh diharapkan akan lebih baik. Penelitian selanjutnya diharapkan peneliti mendampingi langsung para responden pada saat pengisian kuesionernya agar responden tidak salah paham dalam mengisi butir pertanyaan didalam kuesioner.

DAFTAR RUJUKAN

- Arfianti, D. (2011). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang)*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Universitas Diponegoro.
- Ismail, W., & Widodo. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, XIX(ISSN 1979-6471).
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Purba, M. P. (2012). *Profesi Akuntan Publik di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Putra, I. M., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat pada Efektifitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28.
- Ramadan, W. S. (2019). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Transparansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Safrizal, Taufik, T., & Putra, A. A. (2019). Pengaruh Otonomi Desa, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi, Komitmen Aparatur Desa, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. *JOM FEB*, 05(02).
- Situmorang, Y. B. (2018). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*. Universitas Riau.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 02(01).
- Triyono, Achyan, F., & Arief, M. (2018). Akuntabilitas Penentu Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa di Kabupaten Wonogiri). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2).
- Umami, R., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 06, 11.
- Yuliarta. (2013). The Influence of Finance Administrative Competence, The System of Intern Government Control, and Territory Finance Monitoring Towards The Value of Finance Report Information of Padang City Government. *He Thesis of People Economic Faculty State University of Padang*, A247, 529–551.